



**Work Culture and Public Communication of the Mentawai Islands
TAGANA in Disaster Management**

**Budaya Kerja dan Komunikasi Publik TAGANA Kabupaten
Kepulauan Mentawai dalam Manajemen Bencana**

Desriman*, Aldri Frinaldi
Universitas Negeri Padang (Indonesia)
desriman.bazz@gmail.com

Received February 2023

Accepted March 2023

Abstract

This research aims to describe the implementation of work culture and public communication processes of the TAGANA (National Search and Rescue Team) in Kepulauan Mentawai Regency in disaster management, particularly in the disaster risk reduction communication program. This study is a qualitative research using descriptive method. The research tool is the researcher himself, supported by interview guidelines, note-taking books, and mobile phones as supporting tools. Data collection was carried out through interviews, observations, and documentation studies. Triangulation source technique was used to test data validity. The data analysis technique used was data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show the implementation of good work culture. Based on work culture analysis according to Aldri (2017), structured leadership, the use of attributes such as uniforms, flexible working time rules, good communication, member capacity improvement, member discipline, and values as the basis for achieving organizational goals were found. Disaster risk reduction communication was carried out with TAGANA as the leading sector and communicator, and always coordinating with other agencies. The process of implementing disaster risk reduction communication was carried out by first finding communication facts, planning, implementing communication, and ending with evaluation. There are five elements of communicators according to Crowley and Mitchell (1944), but in the Disaster-Ready Village program, only three were involved: the government, the community, and the mass media. The industry and academic elements were not involved in the PRB communication process in the DRB program because they have not been involved much in the pre-disaster process, and are more involved in the process during actual disasters.

Keywords – Work culture, communication, TAGANA, disaster, Mentawai Islands Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi budaya kerja dan proses komunikasi publik TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam manajemen bencana khususnya pada program komunikasi pengurangan risiko bencana. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Alat penelitian adalah peneliti sendiri yang didukung oleh alat pendukung berupa pedoman wawancara, buku catatan, dan telepon genggam. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber.

Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah ditemukannya implementasi budaya kerja yang baik. Berdasarkan analisis budaya kerja menurut Aldri (2017), kepemimpinan terstruktur, ada penggunaan atribut berupa seragam, aturan terkait waktu kerja yang fleksibel, komunikasi yang berjalan cukup baik, adanya peningkatan kapasitas anggota dan pendisiplinan anggota serta adanya nilai menjadi dasar untuk bertindak mencapai tujuan organisasi. Komunikasi pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan TAGANA sebagai leading sektor dan komunikator, dan selalu melaksanakan koordinasi dengan instansi lain. Proses pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana dilakukan dengan terlebih dahulu menemukan fakta komunikasi, perencanaan, pelaksanaan komunikasi dan diakhiri dengan evaluasi. Terdapat lima unsur komunikator menurut Crowley dan Mitchell (1944), tetapi pada program Kampung Siaga Bencana hanya melibatkan tiga diantaranya yaitu pemerintah, masyarakat dan media massa. Unsur industri dan akademisi tidak terlibat dalam proses komunikasi PRB dalam program KSB karena unsur industri dan akademisi belum banyak melibatkan diri dalam proses prabencana, mereka lebih banyak terlibat dalam proses saat terjadinya bencana.

Kata kunci – Budaya kerja, komunikasi, TAGANA, bencana, Kabupaten Kepulauan Mentawai

How to cite this article:

Desriman, D., & Frinaldi, A. (2023). Budaya Kerja dan Komunikasi Publik TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Manajemen Bencana. *Educaniora: Journal of Education and Humanities*, 1(1), 162–169. <https://doi.org/10.59687/educaniora.v1i1.25>

A. Pendahuluan

Bencana merupakan ancaman yang sangat besar bagi keselamatan baik harta benda hingga nyawa manusia dan membuat fungsi normal dari masyarakat yang terkena bencana menjadi terganggu (Pusponegoro dan Sujudi, 2016). Indonesia sebagai negara yang berada di sepanjang garis khatulistiwa dan jejeran cincin api sangat kaya dan rentan terhadap ancaman bencana yang akan terjadi. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kerentanan dan risiko tinggi terhadap ancaman bencana khususnya gempa bumi dan tsunami adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2012, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatatkan beberapa kejadian gempa dengan potensi tsunami diantaranya yaitu pada tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), perairan di antara Pulau Sipora dan Painan pada tahun 2007 (7,7 SR) dan pada tahun 2010 di Pulau Pagai Selatan (7,7 SR). Selain itu masih ada potensi gempa besar berkekuatan sekitar 8,8 SR yang berada pada bagian bawah lempeng Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Dimana gempa potensi gempa yang besar ini tidak hanya menjadi ancaman bagi Kepulauan Mentawai, namun juga mengancam Kota Padang, dan Bengkulu (LIPI, 2012).

Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan peningkatan komunikasi dan edukasi kesiapsiagaan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. Terlebih pelaksanaan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana memerlukan banyak pihak untuk berpartisipasi. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 menerangkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan sosial yang direkrut, ditetapkan, dan diawasi oleh pemerintah yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat prabencana, tanggap darurat, pasca bencana dan pelaksanaan tugas-tugas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

TAGANA melalui Direktorat Perlindungan Sosial dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berkedudukan di bawah Kementerian Sosial dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial. Adapun maksud diadakannya TAGANA adalah untuk mendayagunakan dan memberdayakan masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi bagian dari relawan penanggulangan bencana dan bertujuan meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana baik pada saat sebelum terjadi, saat terjadi bencana dan pasca saat bencana berlalu. Sebagai organisasi relawan yang membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki peran dalam melaksanakan manajemen bencana, khususnya melalui kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana. kegiatan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan dengan pelaksanaan program Kampung Siaga Bencana (KSB) dan TAGANA Masuk Sekolah (TMS) dengan TAGANA sebagai *Leading Sector*-nya.

Seiring dengan dibentuknya Lumbung Sosial (Lumsos) di delapan lokasi rawan bencana di Kabupaten Kepulauan mentawai pada Juni 2021 oleh Kementerian Sosial, maka dimulai pula pelaksanaan komunikasi PRB dengan membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di setiap lokasi penempatan lumbung sosial sekaligus dilaksanakan kegiatan TAGANA Masuk Sekolah sebagai wadah pembinaan dan penyebaran informasi dan pengetahuan kebencanaan kepada masyarakat. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai atau yang biasa disebut Dinsos P3A sebagai pembina terhadap organisasi TAGANA melalui program KSB dan TMS diharapkan mampu mengarahkan TAGANA melaksanakan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana dengan baik yang bertujuan meningkatkan kesiapan dan pengetahuan masyarakat dalam mengambil sikap pada saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan saat setelah terjadi bencana. nantinya masyarakat yang tersentuh melalui program ini akan mendapat pengetahuan dan dapat mempersiapkan mental, logistik, mengetahui tanda- tanda akan terjadi bencana, langkah pertama saat terjadi bencana dan langkah pemulihan pasca bencana.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di Dinsos P3A dan TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait komunikasi pengurangan risiko bencana, ditemukan beberapa permasalahan seperti tidak adanya pertemuan rutin yang dilakukan secara berkala sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi dan minimnya pertukaran informasi pada Forum PRB. Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses untuk melakukan pertemuan secara langsung yang disebabkan oleh sebaran anggota yang berada jauh dari pusat komando TAGANA. Jarak dan akses transportasi yang sulit ini mengharuskan anggota TAGANA berkomunikasi melalui media elektronik seperti aplikasi *WhatsApp* (WA), namun tentu penggunaan media elektronik di Kabupaten kepulauan Mentawai juga memiliki kesulitan dimana masih terbatasnya akses sinyal. Hal inilah yang menyulitkan komunikasi dan penyampaian laporan terkait kebencanaan. Sedangkan informasi yang disampaikan harus segera ditindaklanjuti.

Pelaksanaan program Kampung Siaga Bencana (KSB) juga menghadapi kendala dimana wilayah Desa yang telah dibentuk KSB tidak secara rutin diberikan pembinaan baik oleh TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun Dinsos P3A. KSB yang telah terbentuk menjadi vakum dan tidak dapat menyebarkan informasi dan komunikasi pengurangan risiko bencana disebabkan minimnya pengetahuan, anggaran dan panduan dalam menyebarkan informasi kebencanaan. Pelaksanaan KSB yang tidak efektif ini membuat masyarakat tidak tersentuh terhadap pengetahuan dan pesan pengurangan risiko bencana sehingga menjadikan masyarakat sangat rentan menjadi korban dan mengalami kerugian apabila terjadi bencana. Terkait tujuan Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana adalah meningkatkan kesiapan dan pengetahuan masyarakat dalam mengambil sikap pada saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan saat setelah terjadi bencana, masyarakat merasa program ini belum

tersampaikan dengan baik dikarenakan kebanyakan petugas yang menyampaikan informasi kebencanaan tidak memiliki identitas yang jelas untuk dikenali. Terlebih penyebaran informasi kebencanaan yang juga disampaikan melalui surat kabar dan artikel pada media *online* tidak dapat dijangkau oleh masyarakat dikarenakan sasaran dari program ini adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah rawan bencana kebanyakan memiliki ekonomi yang rendah dan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengakses informasi tersebut. Ini selaras dengan tingginya angka masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di daerah perkampungan karena sukar untuk dicapai. (Widayani, 2013). Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Budaya Kerja dan Komunikasi Publik TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Manajemen Bencana".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di daerah kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun data- data yang dikumpulkan melalui studi observasi, dokumentasi, dan metode wawancara. Untuk menguji keabsahan data akan digunakan teknik triangulasi, menurut Sugiyono (2017:9) cara atau teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik triangulasi. Pada penelitian ini pemilihan informan penelitian digunakan teknik *purpose sampling*. Sedangkan informan yang dipilih adalah orang yang dapat memberikan data secara maksimal dan didasarkan pada relevansi pengetahuan dan memahami masalah yang diteliti (Moelong, 2011) yaitu budaya kerja dan komunikasi publik TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam manajemen bencana. Informan yang berkemungkinan berhubungan langsung dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

C. Hasil dan Pembahasan

1. Budaya Kerja dan Komunikasi Publik TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Manajemen Bencana

a. Budaya Kerja

Ketika menganalisis budaya kerja dan komunikasi publik TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai peneliti menggunakan dua teori yaitu budaya kerja menurut (Frinaldi, A., 2017) dan model perencanaan komunikasi (Cutlip dan Center, 2005) dapat dilihat sebagai berikut. Budaya kerja menurut (Frinaldi, 2017) setidaknya harus memenuhi beberapa unsur sebagai indikator sebagai berikut.

Kepemimpinan

Kepemimpinan TAGANA dalam manajemen bencana terutama pada pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko bencana (PRB) dapat dikatakan kurang baik. Hal ini dapat dilihat mulai dari program yang bukan hasil inovasi Koordinator TAGANA melainkan program tuntutan dari pemerintah pusat yang digalakkan di seluruh daerah di Indonesia. Arah dan instruksi dalam pelaksanaan program ini juga lebih dominan dipegang oleh pimpinan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang yang menangani kegiatan kebencanaan yaitu Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun pimpinan TAGANA, Bobby Irawan selaku koordinator Kabupaten memberikan instruksi dan penugasan kepada anggota TAGANA dalam bentuk meneruskan instruksi yang diberikan oleh pimpinan bidang dan dinas. Namun dalam operasional di lapangan pelaksanaan program dipimpin oleh koordinator TAGANA yang telah mengikuti pendidikan TAGANA lanjutan dan telah mencapai peringkat TAGANA Madya. Dengan pengalaman dan kemampuan itu Korkab TAGANA dapat menggerakkan anggota lainnya untuk menyelenggarakan komunikasi pengurangan risiko bencana ini dengan maksimal.

Korkab juga rutin melakukan rapat dan berkoordinasi baik dengan anggota, pimpinan dinas maupun instansi terkait lainnya baik untuk mengevaluasi intensitas jalannya program, kendala yang dihadapi maupun berapa banyak laporan bencana yang memerlukan mobilisasi anggota TAGANA untuk menanggulangnya.

Penampilan

Tampilan yang disediakan pada kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana terutama pada program Kampung Siaga Bencana dan TAGANA masuk sekolah dapat dikatakan sangat kurang, dikarenakan minimnya alat peraga dan tanda informasi yang menjelaskan program tersebut. Kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan secara tatap muka dalam bentuk pertemuan baik sosialisasi maupun simulasi hanya menggunakan spanduk sebagai penanda pelaksanaan program dan dokumentasi, maupun pasca kegiatan tatap muka alat peraga yang digunakan dibawa kembali. Penampilan anggota TAGANA dalam melaksanakan kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana dalam segi seragam dan atribut, dikatakan cukup baik. hal ini dapat dilihat pada setiap kegiatan lapangan yang sudah terprogra mseperti TAGANA Masuk Sekolah dan sosialisasi KSB, anggota TAGANA sudah menggunakan seragam sehingga memunculkan identitas dan dapat dikenali oleh masyarakat. Dimana hal ini akan mencerminkan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas serta memberi citra yang baik bagi TAGANA (Frinaldi dan Embi, 2011).

Kesadaran akan Waktu

TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berupaya dalam memberikan pelayanan dan respon terhadap informasi pengurangan risiko bencana sebaik mungkin. Apabila ada laporan terhadap suatu kejadian bencana yang masuk, maka TAGANA akan langsung menindaklanjuti informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. TAGANA kabupaten kepulauan mentawai akan memobilisasi anggota yang berada di sekitar wilayah terjadinya bencana untuk melaksanakan tanggap darurat. Akan tetapi hal ini belum berdampak cukup baik dikarenakan adanya masalah pada akses komunikasi yang membuat laporan akan lebih lambat diterima dan mobilisasi anggota TAGANA untuk keadaan darurat akan sulit dilakukan. Atas faktor ini pula seringkali terjadi keterlambatan mengirimkan laporan rutin yang menjadi tanggung jawab TAGANA.

Komunikasi

Komunikasi yang terjalin antar pegawai di pusat Komando TAGANA maupun di seluruh sebaran anggota sudah berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat dari proses pertukaran informasi yang dilakukan tidak hanya dengan melaksanakan rapat atau pertemuan tatap muka, namun juga dilakukan dengan cara berkomunikasi dan bertukar informasi melalui WhatssAp. Inovasi dalam komunikasi oleh TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai ini memudahkan proses pelaporan kegiatan, pemberian instruksi, maupun memberikan *feedback* atas permintaan data atau informasi yang disampaikan oleh pimpinan. Tidak hanya itu, penggunaan media komunikasi ini juga mempermudah mobilisasi anggota TAGANA mengingat lokasi tugas yang berjauhan. Namun, komunikasi kepada masyarakat dalam pengurangan risiko bencana melalui pesan yang disampaikan dari surat kabar maupun media elektronik seperti portal online masih kurang maksimal. Ini menjadi tidak maksimal karena kurangnya intensitas keikutsertaan media atau pers dalam menyampaikan pesan pengurangan risiko bencana, ditambah tidak adanya peruntukan anggaran untuk menyebarkan informasi pengurangan risiko bencana secara masif oleh Dinas Sosial P3A maupun Pemerintah Daerah. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerimaan informasi pengurangan risiko bencana oleh masyarakat juga disebabkan oleh faktor ekonomi, kebanyakan masyarakat yang menjadi tujuan komunikasi pengurangan risiko bencana ini

berdomisili di lokasi rawan bencana dan memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, sehingga rata-rata tidak memiliki kemampuan finansial dan akses menjangkau informasi tersebut. Sementara alat peraga komunikasi lain seperti papan peringatan dan spanduk himbauan yang dapat dilihat secara langsung tidak ada. Kurangnya penyebaran komunikasi pengurangan risiko bencana oleh TAGANA inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak tersentuh informasi pengurangan risiko bencana.

Penghargaan dan Pengakuan

Masih kurangnya penghargaan dan pengakuan yang diberikan baik oleh pimpinan Dinas Sosial dan TAGANA kepada anggota, sehingga motivasi dalam bekerja menjadi kurang. Dalam melakukan layanan yang sifatnya memberi jasa, dibutuhkan penghargaan bagi anggota sehingga anggota tersebut dapat memberi *feedback* berupa peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, apalagi TAGANA berstatus sebagai relawan. Sedangkan untuk anggota TAGANA yang telah lama mengabdikan, sejauh ini hanya ada pelatihan dan pendidikan kesiapsiagaan bencana atau *upgrading* TAGANA yang dilaksanakan oleh kementerian sosial, adapun untuk pelatihan yang bertujuan meningkatkan status keanggotaan TAGANA menjadi TAGANA Madya belum pernah diikuti oleh TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun bagi setiap pelanggaran dan peninggalan tugas yang ditemukan, secara berperingkat akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga pemberhentian dari keanggotaan bagi pelanggaran berat, fatal dan berulang. Hal ini senada dengan pendapat Aldri (2014), yang menyatakan perlunya reward and punishment bagi aparatur yang mempunyai prestasi dan bagi yang melakukan penyimpangan atau yang belum mencapai target prestasi kerja. Bentuk penghargaan dan pengakuan itu dapat bermacam-macam misalnya promosi jabatan, dan kesempatan mengikuti pendidikan. Namun upaya pendisiplinan sangat sulit untuk dilakukan disebabkan oleh faktor jarak dan evaluasi terhadap laporan yang jarang dilaksanakan.

Nilai dan Kepercayaan

Nilai dan kepercayaan yang diterapkan oleh TAGANA berlandaskan dalam manajemen bencana, TAGANA Mentawai berpatokan pada nilai *repedman*, atau merawat ingatan terkait kejadian bencana dan faktor yang mendahului atau menyebabkan bencana itu terjadi. Sehingga dengan nilai ini anggota TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih peka dan siap dalam menghadapi bencana. Namun, di sisi lain pelayanan yang didasari pada nilai *repedman* ini tidak dicantumkan pada maklumat pelayanan dan nilai-nilai kedisiplinan lainnya tidak dibukukan sehingga anggota merasa tidak ada aturan mengikat yang harus diterapkan. Hal ini senada dengan pandangan ahli bahwa Nilai dan kepercayaan setempat adalah hal yang memengaruhi budaya kerja anggota organisasi dalam menjalankan tugas. Keyakinan terhadap sesuatu akan mendasari perilaku anggota organisasi dalam bekerja dan mencerminkan pandangan dan kepercayaan anggota organisasi dalam kesehariannya (Aldri, 2014).

b. Komunikasi Publik TAGANA

Berikut adalah gambaran yang berisi ringkasan mengenai kegiatan komunikasi pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menggunakan analisis model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center (2005) yaitu sebagai berikut.

(1) Penemuan Fakta, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi dalam Program Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Proses komunikasi pengurangan risiko bencana dalam kegiatan Kampung Siaga Bencana dilakukan dengan terlebih dahulu menemukan fakta komunikasi, perencanaan, pelaksanaan

komunikasi dan diakhiri dengan evaluasi (Cutlip dan Center, 2005). Dalam pelaksanaan KSB, terlebih dahulu dilakukan penemuan fakta (*fact finding*) yang bertujuan mengetahui keadaan sasaran komunikasi. Selanjutnya dilakukan perencanaan komunikasi dengan menentukan tujuan komunikasi. Tujuan pelaksanaan program KSB adalah untuk mengurangi risiko akibat bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya Desa Tuapejat, Desa Sikakap, Desa Bulasat dan Desa Muara Siberut, Desa Muara Sikabalan, Desa Pasakiat Tailleu, Desa Saibi Samukop dan Desa Simalegi. Pada pelaksanaannya kegiatan Komunikasi berisi pembentukan Kampung Siaga Bencana sekaligus sosialisasi dan mitigasi. Selain itu, isi pesan dari kegiatan KSB ini juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengasah kreativitas dengan merawat dan memanfaatkan lahan dan sumber daya alam di Desa masing-masing untuk mengurangi risiko bencana. Adapun hl terakhir yang dilakukan adalah dengan melaksanakan evaluasi terhadap hasil dan kendala dari program yang telah dilaksanakan.

(2) Aktor Komunikasi KSB di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Jika melihat unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi risiko yang dikemukakan oleh William Leiss dalam Crowley dan Mitchell (1944), adabeberapa unsur yang tidak terlibat dalam proses komunikasi program KSB. Komunikasi risiko yang efektif menurut Leiss melibatkan lima unsur dalam pelaksanaannya. Kelima unsur tersebut diantaranya, pemerintah, industri, media massa, akademisi, dan masyarakat. Dalam program KSB hanya melibatkan 3 dari 5 unsur yang ada, yaitu pemerintah, media massa, dan masyarakat. Unsur industri dan akademisi tidak terlibat dalam proses komunikasi PRB dalam program KSB. Halini karena unsur industri dan akademisi belum banyak melibatkan diri dalam proses prabencana, mereka lebih banyak terlibat dalam proses saat terjadinya bencana.

(3) Evaluasi Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Dalam proses evaluasi terdapat pembahasan capaian pelaksanaan program kerja, beserta hambatan yang dihadapi. Hambatan dari pelaksanaan komunikasi pengurangan risiko di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain anggaran dana yang tidak sesuai dengan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang luas terbentang dari kecamatan Siberut Barat sampai Pagai Selatan. Karena wilayah yang luas tersebut pula membuat sulitnya menjangkau semua masyarakat di wilayah rawan bencana dalam waktu yang singkat, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan berproses.

D. Simpulan

Budaya kerja dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan Manajemen Bencana terutama dalam komunikasi pengurangan risiko bencana telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan kemampuan dan kapasitas TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai meskipun terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan analisis budaya kerja menurut Aldri (2017), kepemimpinan dan struktur organisasi TAGANA sudah terbentuk, ada penggunaan atribut sebagai identitas yang dapat dikenali, aturan terkait waktu kerja yang fleksibel sebagai relawan bencana, komunikasi yang berjalan cukup baik, adanya peningkatan kapasitas anggota sebagai bentuk apresiasi dan pendisiplinan anggota dalam bentuk sanksi serta adanya nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar untuk bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi pengurangan risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan oleh TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai aktor utama komunikasi pengurangan risiko bencana.

Selain itu, aktor komunikasi lain yang terlibat di antaranya pemerintah daerah, TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan industri yang berperan menjadi relawan dalam lingkungannya sendiri melalui koordinasi dengan TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai, masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui keterlibatannya dalam kelompok relawan bencana binaan TAGANA Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Daftar Pustaka

- Cutlip, S. M., Allen H. C., Broom, G. M. (2005). *Effective Public Relations (Edisi Delapan)*. PT Indeks Kelompok Gramedia
- Crowley, D. (1994). *Communication Theory Today* (Mitchell D, ed). Stanford University Press.
- Frinaldi, A. (2017). *Mengelola Budaya Organisasi dan Budaya Kerja .Acuan Bagi Akademis, Praktisi, dan Pemerhati Budaya Kerja*. UNP Press.
- Frinaldi, A. (2014). Pengaruh Budaya Kerja Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Payakumbuh. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 13(2), 180-192
- Frinaldi, A., & Embi, M. A. (2011). Pengaruh Budaya Kerja Etnik Terhadap Budaya Kerja Keadilan dan Keterbukaan PNS Dalam Membangun Masyarakat Madani dan Demokrasi. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora*, 10(1), 52-61.
- Leiss W. (1994). *Risk Communication and Public Knowledge*.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2012. *Evaluasi Terhadap Inatews. Harapan Dan Kenyataan Pada Peristiwa Gempa Bumi Outer-Rise, 11 April 2012*. Jakarta: Compress-LIPI.
- Moleong. (2011) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya
- Pusponegoro, A. D., (2016). *Kegawatdaruratan dan Bencana: Solusi dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Medik & Kesehatan*. Rayyana Komuniasindo
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- Widayani, H. (2013). Upaya Penanganan Kemiskinan Serta Keamanan DanKetertiban Masyarakat Di Kabupaten Sleman (Studi pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan serta Polres Sleman). *Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta: tidak dipublikasikan*.

Educaniora: Journal of Education and Humanities, 2023

www.educaniora.org



Article's contents are provided on an Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons International License. Readers are allowed to copy, distribute and communicate article's contents, provided the author's and Educaniora journal's names are included. It must not be used for commercial purposes. To see the complete licence contents, please visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>